

ANALISIS KUALITAS DESAIN DAN KUNJUNGAN SITUS PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Tb. M. Yusuf Khudri
Dwi Martani
Teguh I. Maulana

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
Gd. Departemen Akuntansi, Kampus Baru FEUI Depok, Indonesia, 16424
(yusufkhudri@yahoo.com; martani@ui.ac.id; teguh.iman22@ui.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas desain dan statistik kunjungan situs pemerintahan daerah (PEMDA) tingkat kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Kualitas desain didasarkan pada indikator kualitas yang dikembangkan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian menggunakan data populasi situs PEMDA di Indonesia berdasarkan hasil observasi situs pada Mei 2013. Analisis dilakukan bersifat deskriptif serta inferensial yang menunjukkan hasil bahwa terdapat variasi antardaerah terkait kualitas desain maupun kunjungan terhadap situs PEMDA. Walaupun secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas desain situs PEMDA di Indonesia masih kurang memuaskan. Rendahnya kunjungan terhadap situs PEMDA mengindikasikan kurang menariknya situs PEMDA bagi pengguna informasi meskipun dapat menandakan kemungkinan tidak adanya kepedulian pengguna informasi atas kondisi dan pelaksanaan pemerintahan di daerah mereka. Selain itu ditemukan bahwa tingkat pendapatan asli daerah dan ukuran daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas desain situs PEMDA di Indonesia.

Kata kunci: pemerintah daerah, desain situs, kabupaten/kota, Indonesia, kualitas situs

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi di Indonesia, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan negara ditandai dengan dikeluarkannya berbagai paket perundang-undangan yang mengatur lebih ketat pengelolaan dan pemanfaatan keuangan negara. Salah satu isu pengelolaan keuangan publik yang banyak mendapat perhatian adalah masalah transparansi. Isu transparansi di Indonesia sebelum era reformasi merupakan hal sensitif yang sulit diperoleh karena pembatasan akses informasi oleh rezim berkuasa. Padahal Shuler, Jaeger dan Bertot (2010) menyatakan bahwa transparansi dan hak atas akses informasi sektor publik merupakan bentuk mendasar dari partisipasi demokrasi, mendorong kepercayaan terhadap

pemerintahan, mencegah korupsi, penginformasian pengambilan keputusan, meningkatkan akurasi informasi pemerintahan, serta fungsi-fungsi mendasar lainnya di dalam masyarakat.

Di sisi lain, seiring dengan perkembangan dunia teknologi informasi, pengadopsian teknologi berbasis web untuk menyampaikan dan menjalankan pelayanan publik menjadi tren terkini dalam administrasi publik (Wong dan Welch, 2004). Pemanfaatan teknologi informasi dipandang sebagai saluran positif dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik dan pemberdayaan publik (La Porte, de Jong, dan Demchak, 2002). Dalam praktik internasional khususnya terkait transparansi, keberadaan teknologi informasi secara signifikan dinilai mengurangi biaya pengum-

pulan, pendistribusian dan pengaksesan informasi sektor publik (Roberts, 2006). Selain itu, diharapkan dengan semakin banyak informasi yang disampaikan secara tepat waktu maka dapat meningkatkan transparansi sektor publik dan meningkatkan kemampuan publik dalam mengawasi kinerja institusi publik (Wong dan Welch, 2004).

Seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia, tuntutan terhadap situs yang berkualitas menjadi hal yang tidak terelakan. Terutama bagi PEMDA, dibutuhkan sebuah situs yang menarik baik dari segi isi (*content*) maupun tampilan (*design*). Hal tersebut penting agar masyarakat memiliki keinginan membuka dan memanfaatkan situs PEMDA sehingga proses *e-government* dapat berjalan. Namun sayangnya sejauh pengetahuan penulis, penelitian yang secara komprehensif berusaha meneliti kualitas tampilan situs terutama pada situs PEMDA sangatlah terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas situs web yang dimiliki PEMDA di Indonesia terutama pada tingkat PEMDA kabupaten/kota. Studi yang dilakukan menyempurnakan studi pendahulu dengan menganalisis seluruh situs PEMDA sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan kondisi aktual yang dihadapi setiap daerah. Kemudian penelitian ini pun merumuskan sebuah panduan kepada PEMDA dalam merancang situs daerahnya yang sesuai dengan harapan dan standar terbaik yang ada.

Beattie dan Pratt (2001) mengungkapkan bahwa internet dianggap memberikan proses revolusi yang potensial terhadap pelaporan karena internet memiliki skala penggunaan yang global, kapasitas yang interaktif, dan kecepatan yang baik. Dalam praktik internasional, Roberts (2006) menyatakan bahwa internet secara signifikan mengurangi biaya pengumpulan, pendis-

tribusi, dan akses terhadap informasi pemerintahan. Publik seharusnya lebih mudah dalam mengakses informasi penting yang sebelumnya hanya dapat dilakukan melalui dokumen tercetak (Sari dan Martani, 2012). Penggunaan internet untuk mendorong transparansi adalah suatu yang wajar tidak hanya dalam kapasitas teknologi yang dimilikinya, tetapi juga karena internet dapat memenuhi ekspektasi sebagian besar masyarakat (Jaeger dan Bertot, 2010).

Penelitian terkait kualitas tampilan situs sangatlah terbatas. Padahal kualitas tampilan situs dapat merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kehendak pengguna informasi dalam memanfaatkan situs sebagai sumber informasi mereka. Hermana dan Silfianti (2011) mengevaluasi penerapan situs dalam implementasi *e-government* di Indonesia berdasarkan karakteristik web, popularitas web dan *webmetrics*. Walaupun tidak secara spesifik berfokus pada kualitas tampilan situs, hasil penelitian mereka menunjukkan terdapat perbedaan *webpage* antara Jawa dan di luar Jawa. Penelitian Hermana et al (2012) yang mencoba meneliti kualitas situs PEMDA salah satunya berdasarkan fitur web. Walaupun fitur web yang digunakan terbatas, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa profil daerah merupakan fitur yang paling umum disajikan sedangkan FAQ merupakan fitur paling jarang disajikan pada situs PEMDA.

Secara umum, variabel teridentifikasi dikelompokkan menjadi kapasitas finansial daerah dan karakteristik daerah. Perez et al (2009) mengungkapkan bahwa daerah dengan kondisi keuangan yang lebih baik dapat membangun infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik sehingga dapat memberikan informasi yang lebih banyak kepada masyarakat. Di sisi lain, dalam *signaling theory* pada sektor privat disebutkan bahwa pengungkapan

informasi dapat menjadi sinyal kepada pengguna informasi terkait kondisi yang dihadapi suatu entitas. Dalam kaitannya dengan belanja daerah, PEMDA setempat akan mengungkapkan lebih banyak terkait keberhasilan pembangunan yang dibiayai melalui belanja modal. Namun ketika belanja yang sifatnya rutin seperti belanja pegawai atau belanja barang/jasa akan cenderung tidak diungkapkan.

H1: Terdapat hubungan positif antara besaran belanja modal daerah terhadap kualitas desain situs PEMDA

H2: Terdapat hubungan negatif antara besaran belanja pegawai daerah terhadap kualitas desain situs PEMDA

H3: Terdapat hubungan negatif antara besaran belanja barang/jasa daerah terhadap kualitas desain situs PEMDA

Ketergantungan terhadap dana transfer telah menjadi salah satu variabel yang banyak diuji dalam berbagai penelitian terkait tata kelola pada sektor publik. Ingram (1984) yang memandang dana transfer sebagai media pemerintah yang lebih tinggi untuk memberikan tekanan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam menjalankan tata kelola wilayahnya. Sedangkan Giroux dan McLelland (2003) telah menunjukkan bahwa pendapatan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mendukung upaya menjalankan tata kelola di daerahnya. Semakin tinggi pendapatan asli daerah mengisyaratkan semakin tinggi kemampuan dalam menyiapkan media yang baik untuk mengomunikasikan informasi kepada publik.

H4: Terdapat hubungan positif besaran PAD terhadap kualitas desain situs PEMDA

Giroux dan McLelland (2003) menemukan bahwa terdapat perbedaan antara kota yang memiliki walikota berupa *city manager* atau *major-council*

terkait kebijakan tata kelola pemerintahan mereka. Dalam konteks Indonesia dikarenakan seluruh kepala daerah dipilih secara langsung, perbedaan penentuan kepala daerah tidaklah relevan. Namun, terdapat perbedaan karakteristik daerah yang berbentuk kabupaten atau kota dianggap lebih memiliki dampak terhadap kualitas tata kelola PEMDA. Martani dan Lestiani (2012) telah mencoba melihat dampak jenis pemerintahan kabupaten dan kota terhadap pengungkapan informasi keuangan, tetapi tidak menemukan signifikansi perbedaan keduanya walaupun menunjukkan arah yang positif. Hal tersebut mungkin disebabkan terbatasnya sampel yang digunakan dalam penelitian mereka.

H5: Terdapat perbedaan kualitas situs PEMDA kabupaten dan kota di Indonesia.

Sebagai salah satu *stakeholders* bagi suatu instansi pemerintahan, peran penduduk sangatlah penting dalam mendorong upaya transparansi di PEMDA. Semakin banyak jumlah penduduk maka tekanan untuk meminta informasi juga semakin besar yang mendorong pemerintah setempat untuk menyediakan media penyampaian informasi yang lebih baik. Piotrowski & Bertelli (2010) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah penduduk dengan penungkapan informasi laporan keuangan. Variabel serupa juga telah digunakan Ingram (1984) dalam penelitiannya.

H6: Terdapat pengaruh positif jumlah penduduk suatu daerah terhadap kualitas desain situs PEMDA

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan populasi (491) situs PEMDA tingkat kota/kabupaten di Indonesia. Akses terhadap situs dilakukan pada bulan Mei 2013 dan

pencarian situs PEMDA terkait melalui mesin pencari (*search engine*) *google.co.id*. Untuk konsistensi hasil, pencarian menggunakan kata kunci “kota #namakota#” atau “kabupaten #namakabupaten#”. Penilaian terhadap seluruh situs dilakukan sendiri oleh peneliti untuk memastikan keseragaman penilaian.

Model Penelitian

Model penelitian ini mengadaptasi beberapa model penelitian pendahulu dengan beberapa perubahan dalam pengukuran variabel dependen maupun independen yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan data di

Indonesia. Model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{DESIGN} = \beta_0 + \beta_1 \text{CAPSPEN} + \beta_2 \text{EMPSPEN} + \beta_3 \text{GOODSPEN} + \beta_4 \text{PAD} + \beta_5 \text{POP} + \beta_6 \text{TYPE} + \varepsilon \quad (1)$$

Dimana DESIGN adalah Kualitas desain situs, CAPSPEN adalah Belanja modal daerah, EMPSPEN adalah Belanja pegawai daerah, GOODSPEN adalah Belanja barang dan jasa daerah, PAD adalah Pendapatan asli daerah, POP adalah Jumlah penduduk, TYPE adalah Dummy kabupaten/kota.

Dengan pengukuran masing-masing variabel yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Ikhtisar Pengukuran Variabel Penelitian

No	Variabel	Pengukuran
1	Belanja modal (CAPSPEN)	Ln (belanja modal) dari LKPD
2	Belanja pegawai (EMPSPEN)	Ln (belanja pegawai) dari LKPD
3	Belanja barang/jasa (GOODSPEN)	Ln (belanja barang/jasa) dari LKPD
4	Pendapatan asli daerah (PAD)	Ln (jumlah pendapatan asli daerah) dari LKPD
5	Ukuran daerah (POP)	Ln (jumlah penduduk) dari Badan Pusat Statistika
6	Jenis PEMDA (TYPE)	Dummy 1 (kabupaten), 0 (kota)

HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan hasil penelitian yang ditemukan antara lain:

Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data populasi PEMDA tingkat kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan standarisasi kode dan wilayah provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2011. Penelitian ini membatasi penelitian pada website resmi dari pemerintah kabupaten/kota, tidak menilai pada *website-website* satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tautannya berada di luar *website* resmi dari pemerintah kabupaten/kota. Sebagai ilustrasi untuk “Kabupaten Aceh Selatan”, mesin pencari Google pada tanggal 12 Juli 2013, memberikan hasil

“Portal Resmi Pemkab Aceh Selatan” dengan tautan “www.acehselatankab.go.id/” dan dilakukan analisis dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat.

Penelitian ini ingin menilai kualitas *website* dengan mengadopsi kerangka kualitas *website* yang dikembangkan oleh Hasan & Abuelrub (2011), yang terdiri dari beberapa bagian yaitu: *content* (substansi), *design* (desain), *organizations* (organisasi atau pengaturan), *user-friendly* (kemudahan bagi pengguna), pada penelitian ini ditambahkan satu bagian lagi yaitu penghitung kunjungan (*visitor counter*), serta dicatatkan jumlah pengunjungnya pada saat pengambilan data, pada bulan Februari 2013 – Mei 2013. Penyesuaian lebih lanjut dari kerangka penelitian yang dibuat oleh Hasan & Abuelrub (2011), adalah untuk desain hanya digunakan

satu penilaian, mengingat pada masa ini desain *website* pada umumnya telah memiliki ragam warna atau tulisan yang cukup, sehingga untuk desain dijadikan satu pertanyaan saja, yaitu desain *website* mengandung *slider* atau gambar bergerak di halaman muka, sedangkan untuk substansi sudah terdapat pertanyaan mengenai keberadaan gambar, suara maupun video, lebih ke arah substansi atau multi media yang menjelaskan maksud tertentu, sedangkan didesain lebih ke arah penempatannya dalam tampilan *website*.

Nilai kualitas *website* tertinggi sebesar 39 dari nilai maksimum 43, diperoleh dua pemerintahan kabupaten/kota yaitu Kabupaten Buleleng (Bali) dan Kabupaten Garut (Jawa Barat), sedangkan modus atau nilai yang paling banyak adalah nilai 0 yaitu sebanyak 84 pemerintah kabupaten/kota, untuk nilai rerata dari kualitas *website* berada pada nilai: 19,66, dan median 23. Untuk nilai total yang dimungkinkan dari penilaian kualitas *website* adalah 43 yang merupakan hasil dari 43 item yang dinilai untuk masing-masing *website* pemerintah kabupaten/kota. Dari 491 situs kabupaten kota yang mendapat nilai 10 tertinggi dengan nilai adalah, Kab. Buleleng, Kab. Garut, Kab. Solok Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kota Bekasi, Kab. Klungkung, Kab. Purwakarta, Kota Bandung, Kota Pekalongan, dan Kota Sawahlunto. Sedangkan untuk situs kabupaten kota yang memiliki nilai terendah adalah sebanyak 84 situs kabupaten kota dengan nilai 0.

Untuk situs situs yang memiliki *visitor counter* tercatat 227 situs pemerintahan kabupaten kota memiliki fitur *visitor counter* sedangkan sisanya sebanyak 264 tidak memiliki fitur *visitor counter*, dari 227 situs yang memiliki fitur *visitor counter*, tercatat Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Samosir,

memiliki jumlah pengunjung 0, sedangkan Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Boalemo, Kota Gorontalo memiliki jumlah pengunjung 1, hal ini mungkin disebabkan fitur tersebut dipasang, namun tidak berfungsi yang bisa disebabkan oleh salah satunya sistem penyimpanan data untuk data-data jumlah kunjungan.

Situs dengan jumlah kunjungan terbanyak diperoleh situs Kota Bogor, dengan jumlah kunjungan sebanyak 14.945.890, dan paling sedikit, di luar jumlah pengunjung 0, dan 1, adalah situs Kabupaten Pekalongan dengan jumlah pengunjung 70. Untuk 10 kunjungan terbanyak berturut disajikan pada tabel 2, untuk tabel 3 disajikan situs-situs kabupaten kota dengan jumlah pengunjung 10 terkecil.

Berdasarkan data-data di atas, antara lain, masih terdapat 84 situs pemerintah kota dan kabupaten yang mendapatkan nilai 0, dapat diambil kesimpulan awal bahwa perhatian PEMDA kabupaten kota terhadap pengembangan situs masih terbilang rendah, dan mungkin juga hal ini terpengaruh juga oleh kebutuhan masyarakat untuk mengakses situs-situs pemerintah kabupaten/kota, yang ternyata paling tinggi hanya Kota Bogor yang memiliki angka pengunjung oleh kurang lebih 15 juta, walaupun demikian secara total kunjungan terhadap situs-situs pemerintah kabupaten/kota secara total pada saat pengambilan data adalah sebesar: 167,870,197, namun tidak dapat dipastikan asal, dan bagian mana yang diakses, karena penelitian tidak membedah, maksud dan kunjungan pengguna situs pemerintah kabupaten/kota.

Tabel 2. 10 Besar Jumlah Pengunjung Situs Kabupaten Kota

1	KOTA BOGOR	14.945.890
2	KAB. JEMBRANA	14.527.991
3	KOTA DENPASAR	9.226.350
4	KOTA BANDUNG	9.085.285
5	KOTA TEGAL	8.993.010
6	KOTA TARAKAN	7.851.991
7	KAB. TABANAN	6.566.295
8	KAB. LABUHAN BATU	4.703.862
9	KAB. CILACAP	4.321.348
10	KAB. BADUNG	4.154.138

Sumber: Data diolah

Tabel 3. 10 Situs Kabupaten/Kota dengan Jumlah Pengunjung Terkecil

1	KAB. PEKALONGAN	70
2	KAB. NABIRE	322
3	KAB. POLEWALI MANDAR	452
4	KAB. SEMARANG	573
5	KAB. KENDAL	899
6	KAB. KEPULAUAN ARU	1.043
7	KAB. PURWOREJO	1.226
8	KAB. BOLAANG	1.255
9	KOTA PEKALONGAN	1.443
10	KAB. KEPULAUAN SIAU, TAGULANDANG	1.638

Sumber: Data diolah

Tabel 4. Hasil ANOVA dengan Variabel Independen Kelompok PAD dan Kualitas *Website*

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3442,989	2	1721,495	16,809	0,000
Within Groups	49978,888	488	102,416		
Total	53421,878	490			

Sumber: Data diolah

Analisis ANOVA

Analisis berikutnya berupa analisis varians untuk mengetahui kemungkinan terdapatnya perbedaan kualitas desain situs berdasarkan beberapa indikator. Dilakukan analisis varians satu arah (*one way ANOVA*), dengan mengelompokkan kabupaten/kota menurut Pendapatan Asli Daerahnya, yaitu kelompok kabupaten/kota yang masuk ke dalam kabupaten/kota yang termasuk ke dalam 50 kabupaten/kota dengan Pendapatan Asli Daerah tertinggi dan 50 kabupaten/kota dengan Pendapatan Asli Daerah terendah, sedangkan sisanya, dimasukkan ke dalam kelompok tersendiri. Dari hasil analisis ini diperoleh $p = 0,000$ dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan signifikan pada nilai kualitas desain situs pada kelompok kabupaten/kota apabila dikelompokkan berdasarkan pendapatan daerahnya.

Untuk ANOVA dengan mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan dana perimbangan diperoleh hasil yang signifikan. Dari hasil analisis ini diperoleh $p = 0,008$ dimana lebih kecil dari

0,05 sehingga terdapat perbedaan signifikan pada nilai kualitas desain situs pada kelompok kabupaten/kota apabila dikelompokkan berdasarkan besarnya dana perimbangan.

Hasil dari analisis varians untuk rerata dari kualitas desain situs kabupaten/kota yang dikelompokkan menurut total pendapatan menunjukkan hasil yang signifikan ($pp = 0,002$, lebih kecil dari 0,05), hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara kabupaten kota apabila dikelompokkan menurut total pendapatan.

Hasil serupa diperoleh dari hasil analisis varians satu arah (*one way ANOVA*), dengan mengelompokkan kabupaten/kota menurut jumlah penduduk, yaitu kelompok kabupaten/kota yang masuk ke dalam kabupaten/kota yang termasuk ke dalam 50 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk tertinggi dan 50 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terendah, kemudian sisanya, dimasukkan ke dalam kelompok tersendiri. Dari hasil analisis ini diperoleh $p = 0,000$ dimana lebih kecil dari 0,05

sehingga terdapat perbedaan signifikan pada nilai kualitas desain situs pada kelompok kabupaten/kota berdasarkan jumlah penduduknya.

Dari hasil analisis ini diperoleh $p = 0,011$ dimana lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan signifikan pada nilai kualitas desain situs pada kelompok kabupaten/kota apabila dikelompokkan menurut berdasarkan belanja pegawai. Sedangkan diperoleh hasil $p = 0,031$ dimana lebih kecil dari 0,05

sehingga terdapat perbedaan signifikan pada nilai kualitas desain situs pada kelompok kabupaten/kota apabila dikelompokkan menurut berdasarkan belanja barang dan jasa. Serta terkait belanja modal, diperoleh $p = 0,209$ dimana lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan pada nilai kualitas desain situs pada kelompok kabupaten/kota apabila dikelompokkan menurut berdasarkan belanja modal.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Regresi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,359 ^a	0,129	0,118	9,807

a. Predictors: (Constant), GOODSPEN, EMPSPEN, CAPSPEN, PAD, TYPE, POP

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6875,407	6	1145,901	11,915	0,000 ^{b*}
Residual	46546,471	484	96,170		
Total	53421,878	490			

a. Dependent Variable: DESIGN

b. Predictors: (Constant), GOODSPEN, EMPSPEN, CAPSPEN, PAD, TYPE, POP

Variabel	Koefisien	Std Deviasi	Signifikansi	Hipotesis
Konstanta (β_0)	2,100	11,028	0,849	
Belanja Modal (CAPSPEN)	-0,985	1,279	0,441	+
Belanja Pegawai (EMPSPEN)	0,275	0,977	0,779	-
Belanja Barang/jasa (GOODSPEN)	-1,690	1,615	0,296	-
Pendapatan asli daerah (PAD)	2,286	0,734	0,002*	+
Jumlah penduduk (POP)	1,784	0,696	0,011**	+
Jenis pemerintahan (TYPE)	0,848	1,306	0,516	berbeda

Sumber: Data diolah

Keterangan: * Signifikan pada tingkat 1%, ** Signifikan pada tingkat 5%

Analisis Inferensial

Pada bagian analisis yang terakhir, dilakukan penganalisisan secara inferensial berdasarkan model yang telah dikembangkan pada bagian sebelumnya. Secara umum, hasil pengujian statistika dari model dapat dilihat pada tabel 5.

Hanya terdapat dua variabel penjelas yang signifikan memengaruhi kualitas desain situs PEMDA yaitu pendapatan asli daerah (2,286, sig 0,002) dan jumlah penduduk (1,784, sig 0,011). Hal tersebut mendukung hipotesis penelitian bahwa baik pendapatan asli daerah (PAD) maupun jumlah penduduk

memiliki pengaruh positif terhadap kualitas desain situs PEMDA. Hasil ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari tingkat PAD yang semakin tinggi sangat memengaruhi kemampuan daerah dalam menyediakan media informasi yang berkualitas bagi pengguna. Tingginya PAD dapat diartikan pula sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah sehingga PEMDA akan cenderung sebaik mungkin mengalokasikan sebagian pendapatan yang diperolehnya untuk mengomunikasikan melalui media yang baik.

Sejalan dengan pengaruh PAD, keberadaan jumlah penduduk juga berpengaruh positif yang menguatkan hasil penelitian Piotrowski & Bertelli (2010). Kuantitas penduduk yang juga memiliki kualitas yang baik dapat memberikan tekanan kepada PEMDA setempat dalam menyediakan informasi yang memadai. Sehingga pemerintah setempat akan berusaha untuk menyediakan media yang baik sebagai sarana penyampaian informasi salah satunya melalui situs resmi PEMDA yang berkualitas.

Walaupun secara kapasitas finansial berupa PAD memiliki pengaruh signifikan, tetapi terkait dengan kapasitas belanja daerah dianggap tidak berpengaruh terhadap kualitas desain situs. Belanja modal (-0,985, sig 0,441) memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas desain, hal ini dapat berarti bahwa PEMDA dinilai belum dapat memanfaatkan situs resmi mereka dalam mengomunikasikan program-program pembangunan. Meski dapat pula berarti ketika terjadi peningkatan belanja modal alokasi yang digunakan untuk pengelolaan media informasi menjadi berkurang.

Belanja rutin yang diidentifikasi sebagai belanja pegawai (0,275, sig 0,779) dan belanja barang/jasa (-1,690, sig 0,296) ternyata memiliki pengaruh yang beragam. Belanja pegawai dianggap memiliki dampak positif walaupun tidak signifikan. Insignifikannya belanja pegawai dikarenakan umumnya besaran belanja pegawai adalah tetap untuk suatu periode anggaran. Selain itu, dikarenakan belanja pegawai bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, diduga menjadi alasan sehingga memiliki pengaruh positif terhadap kualitas desain. Ingram (1984) menyatakan ketika suatu daerah memperoleh porsi dana transfer yang besar dari pemerintah pusat, pemerintah pusat memiliki kekuatan lebih dalam memberikan tekanan

kepada PEMDA terkait pelaksanaan tata kelola di daerahnya.

Sedangkan belanja barang/jasa seperti yang diperkirakan memiliki dampak negatif walau tidak signifikan. Sifat dari belanja barang/jasa (seperti pembelian mobil dinas, perjalanan dinas) yang dimanfaatkan untuk kepentingan aparat pemerintah setempat cenderung dianggap sebagai pemborosan uang negara. Untuk menghindari tekanan publik, PEMDA akan cenderung membatasi informasi terkait pembelanjaan barang/jasa. Dengan kata lain ketika belanja barang/jasa tinggi, kualitas desain situs akan lebih buruk dalam rangka membatasi akses publik terhadap informasi tertentu.

Variabel yang juga dianggap tidak signifikan adalah jenis pemerintahan (0,848, sig 0,516). Hasil ini menginformasikan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas antara PEMDA kabupaten maupun kota. Berjalannya desentralisasi semenjak reformasi mendorong keterbukaan akses setiap daerah terhadap sumber daya yang dapat bergerak. Sumber-sumber daya berkualitas tidak lagi menjadi wilayah perkotaan, karena saat ini wilayah kabupaten pun dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan sistem tata kelola daerah mereka terutama terkait media transparansi publik. Hasil ini pun didukung oleh statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa daerah-daerah yang memiliki kualitas desain situs yang baik cukup merata pada kelompok kabupaten dan kota. Bahkan empat daerah teratas ditempati oleh daerah berbentuk kabupaten.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap situs-situs PEMDA tingkat Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat variasi antar daerah tingkat kabupaten/kota di Indonesia terkait kualitas desain *website* pemerintahan daerah yang mereka miliki. Walaupun dapat dinyatakan bahwa sebagian besar situs yang dikelola PEMDA tingkat kabupaten/kota di Indonesia masih dinilai rendah. Ditemukan bahwa terdapat variasi yang besar pemanfaatan situs PEMDA oleh pengguna. Sayangnya hampir 50% situs PEMDA tidak mencantumkan informasi statistik pengunjung mereka, walaupun dapat diambil kesimpulan bahwa pengguna informasi masih kurang dalam memanfaatkan situs PEMDA. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi pengelola situs bahwa saat ini situs PEMDA masih kurang menarik bagi pengguna yang mungkin disebabkan kualitas desain yang kurang baik. Meski ada kemungkinan rendahnya pemanfaatan situs ini disebabkan ketidakpedulian konstituen yang perlu dibuktikan melalui penelitian lain.

Berdasarkan beberapa indikator dalam penelitian ini, hasil uji analisis varians menunjukkan terdapat perbedaan secara signifikan kualitas desain situs antara daerah-daerah berdasarkan jumlah penduduk, pendapatan asli daerah, besaran belanja modal, belanja pegawai, belanja barang/jasa, maupun pertumbuhan ekonomi. Tidak meratanya kualitas desain dari setiap daerah merupakan dampak logis dari gambaran statistik tersebut. Ketimpangan tersebut sangat nyata terlihat pada daerah-daerah yang secara umum dikategorikan dalam kelompok rendah untuk seluruh indikator dengan kelompok indikator tinggi.

Serta penelitian ini pun menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk menjadi salah satu faktor penting yang mendorong PEMDA untuk menyediakan situs yang berkualitas. Tingginya PAD menjadi sumber daya penting bagi daerah karena menunjukkan kemampuan daerah dalam memperoleh sumber dana secara mandiri. Semakin tinggi kemampuan pendanaan ini membuat fleksibilitas daerah meningkat dalam mengelola dan menyediakan situs yang berkualitas. Di sisi lain jumlah penduduk yang berkualitas dapat memberikan tekanan kepada PEMDA untuk memberikan informasi yang memadai. Hal ini mendorong PEMDA harus menyediakan sarana yang baik salah satunya melalui situs.

Penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan yang dapat menjadi masukan untuk penelitian sejenis berikutnya. Rendahnya nilai penjelas variabel independen ($adjusted R^2 = 11,8\%$) yang dapat dijelaskan mengindikasikan model yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang menangkap beberapa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas desain situs seperti isu kekuatan politik daerah setempat atau isu sosial seperti pendidikan (Garcia-Sanchez, 2013). Metode pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya dilakukan satu kali untuk setiap situs. Penelitian selanjutnya dapat melakukan beberapa kali pengamatan untuk setiap situs sehingga dapat melihat terjadinya dinamisasi informasi yang terjadi pada setiap situs. Hal yang juga dapat ditingkatkan dalam penelitian lanjutan adalah metode penilaian agar menggunakan metode *polychotomous* sehingga dapat menangkap kedalaman kualitas bukan sebatas keberadaan indikator seperti yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Beattie, V., dan Pratt, K. (2001). *Business reporting: Harnessing the power of the internet for users*. Edinburgh: Institute of Chartered Accountants of Scotland.
- Giroux, Gary, dan McLelland, Andrew J. (2003). Governance structure and accounting practice at large municipalities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22, 203-230.
- Hasan, L. & Abuelrub, E. (2011). Assessing the quality of web sites. *Applied Computing and Informatics* 9, 11-29.
- Hermana B., & Silfianti W. (2011). Evaluating e-government implementation by local government: digital divide in internet based public services in Indonesia. *International Journal of Business and Social Sciences* 2 (3), 156-163.
- Hermana B., Tarigan A., Medyawati H., & Silfianti W. (2012). Information richness, website feature, and financial transparency on the local government website in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 43 (2), 229-236.
- Ingram, Roberts W. (1984). Economic incentives and the choice of state government accounting practices. *Journal of Accounting Research*, 22 (1), 126-144.
- Jaeger, Paul T., Bertot, John C. (2010). Transparency and technological change: Ensuring equal and sustained public access to government information. *Government Information Quarterly*, 27, 371-376.
- La Porte, Todd M., Martin de Jong, dan Chris Demchak. (2002). Democracy and bureaucracy in the age of the web. *Administration and Society* 34, 411-426.
- Martani, Dwi, dan Lestiani, Annisa. (2012). Disclosure in local government financial statements: the case of Indonesia. *Global Review of Accounting and Finance*, 3 (1), 67-84.
- Perez, C.C., Hernandez, A.M, dan Bolivar, M.P. (2005). Citizen access to online governmental financial information: Practices in the European Union Countries. *Government Information Quarterly* 22, 258-276.
- Piotrowski, S. J. (2007). *Governmental transparency in the path of administrative reform*. New York: SUNY Press.
- Piotrowsky, S.J., & Bertelli, A. 2010. *Measuring Municipal Transparency*. 14th IRSPM Conference, Bern, Switzerland, April.
- Roberts, A. (2006). *Blacked out: Government secrecy in the information age*. New York: Cambridge Press.
- Sari, Rora P. & Martani, Dwi. (2012). Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik PEMDA terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website PEMDA. Makalah dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi 2012.
- Shuler, J. A., Jaeger, P. T., & Bertot, J. C. (2010). Implications of harmonizing e-government principles and the Federal Depository Library Program (FDLP). *Government Information Quarterly*, 27, 9-16.
- Wong, Wilson dan Welch, Eric. (2004). Does e-government promote accountability? A comparative analysis of website openness and government accountability. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institution*, 17 (2), 275-279.